

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)PT BPR BANGUN MITRAWADAS TAHUN 2023



Ruko Grand Plaza Blok IV No. 33 Galuh Mas Karawang
TELEPON: (0267) 8456804



BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Bangun Mitrawadas (selanjutnya disebut "BPR BMW") pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023.

BPR BMW memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Karawang. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR BMW didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR BMW.

BPR BMW telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip- prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesenjangan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR BMW selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan

Di sepanjang 2023 dan untuk di tahun- tahun mendatang, BPR BMW terus berupaya untuk mewujudkan hal- hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Agung Triaji Hartyanto
	NIK	:	3273021304870022
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku		
	b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank		
c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.			
d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.			
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.			
f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.			
b. Tingkat Kesehatan Bank dalam kondisi menurun dibanding posisi pada periode sebelumnya.			
c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Bangun Mitrawadas.			
d. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2023.			
e. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing- masing.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Eri Venly
	NIK	:	3175035310820010
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
2.	Nama	:	Sanny Liligandapriatna
	NIK	:	3204104306590004
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risikoyang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Bangun Mitrawadas. d. Memonitor secara ketat setiap debitur agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2023. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR Tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite				:	BPR tidak memiliki Komite

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		



	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR tidak memiliki Komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agung Triaji Hartyanto	3273021304870022	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak ada yang memiliki kepemilikan saham pada BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agung TriajiHartyanto	3273021304870022	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agung TriajiHartyanto	3273021304870022	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR					



2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agung Triaji Hartyanto	3273021304870022	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi Lain pada BPR					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Eri Venly	3175035310820010	Rp0	0%
2.	Sanny Liligandapriatna	3204104306590004	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Eri Venly	3175035310820010	-	-	0%
2.	Sanny Liligandapriatna	3204104306590004	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR



1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Eri Venly	3175035310820010	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Sanny Liligandapriatna	3204104306590004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, maupun dengan Pemegang Saham pada BPR					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Eri Venly	3175035310820010	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Sanny Liligandapriatna	3204104306590004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Komisaris Lain, maupun dengan Pemegang saham pada BPR					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	1	Rp132.000.000	1	Rp52.920.000
2.	Tunjangan	1	Rp27.600.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp159.600.000		Rp52.920.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Selain Gaji yang diterima, Direksi juga mendapat tunjangan BPJS Kesehatan dan Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, serta Tunjangan Tempat Tinggal Sementara (Kontrakan tempat tinggal).					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Kontrakan (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (1)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan(1)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Bentuk Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPSyaitu			
- BPJS Kesehatan - BPJS Ketenagakerjaan			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.83 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.00 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.02 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.66 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah selama Tahun 2023	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	5 Juli 2023	5	Evaluasi rencana tindak sebagai komitmen penyehatan BPR kepada OJK
2.	19 Oktober 2023	10	Update Performance Penanganan kredit bermasalah dan dihapus buku



3.	26 Oktober 2023	6	Rapat Direksi dan Komisaris Membahas Pengajuan Hapus buku dan pertumbuhan kredit baru
4.	29 November 2023	7	Rapat Direksi dan Komisaris Membahas Penentuan Target Rencana Bisnis
5.	5 Desember 2023	6	Rapat Direksi dan Komisaris
6.	14 Desember 2023	6	Rapat Direksi dan Komisaris Membahas Rencana Bisnis dan Kerjasama kredit
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat bertempat di Ruang Rapat Kantor PT. BPR Bangun Mitrawadas			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Eri Venly	3175035310820010	3	1	66.67%
2.	Sanny Liligandapriatna	3204104306590004	5	1	100.00%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Rapat Direksi dan Komisaris dilakukan secara tatap muka, sedangkan Rapat lainnya dilakukan melalui Telekonferensi					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	1	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2023 terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Direksi yaitu kredit fiktif.								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	0	2
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama Tahun 2023 terdapat Permasalahan Hukum yang Dihadapi PT. BPR BangunMitrawadas yaitu Pembuatan Laporan Polisi untuk Koperasi Karya Bina Kasih Subang, dan telah diselesaikan secara kekeluargaan Pelaporan Polisi untuk Koperasi Karyawan PT. Pindo Deli.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Budi Setiawati	Direksi	123456789	Agung Triaji Hartyanto	Direktur Utama	3273021304870022	Jasa Pemeliharaan TSI	33 juta rupiah	Jasa pemeliharaan TSI oleh PT. UKABIMA dibayarkan menyicil setiap bulan beserta Ppn sebesar Rp. 2.775 ribu selama 12kali dalam Tahun 2023.
2.	Harianto	Pemegang Saham	1234567890	Agung Triaji Hartyanto	Direktur Utama	3273021304870022	Sewa Gedung		Penggunaan Gedung kantor tanpa dipungut biaya sewa
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan di Tahun 2023 telah sesuai ketentuan									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama Tahun 2023 Tidak ada Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					



Karawang, 26 Januari 2024

PT BPR BANGUN MITRAWADAS

Dibuat oleh,



Agung Triaji Hartyanto
Direktur Utama

Disetujui oleh,

Eri Venly
Komisaris Utama

Sanny Liligandapriatna
Komisaris